IMPLEMENTASI HUKUM KARTU KREDIT DALAM KEUANGAN SYARIAH (DITINJAU DARI SYARIAT ISLAM)

Relita Rofiqoh

Institut Alif Muhammad Imam Syafi'i

Email: relitarofiqoh@inamis.ac.id

Husnama Patih

STAI Senori Tuban

Email: husnamapatih@staisenorituban.ac.id

Devi Firnanda

Institut Alif Muhammad Imam Syafi'i

Email: devifirnanda@inamis.ac.id

Abstract

This research aims to conduct an analysis of the implementation of contracts that can be used as a legal basis for credit card products in Sharia financial institutions. In Sharia banking, the definition of credit cards is regulated by DSN-MUI Fatwa No.42/DSN-MUI/V/2004 concerning Syariah Charge Card, and No. 54/DSN-MUI/X/2006 is a tool that functions like a credit card is generally based on an existing system that has several parties concerned and is based on Sharia provisions. The use of descriptive qualitative research methods in the Systematic Literature Review. Data collection through references to scientific literature, books, and previous research. The research results show that there are many parties involved in the implementation of credit card transactions and have various differences of opinion regarding the use of credit cards the determination of the credit card contract is still debated among clerics. Determination of the contract is something that is said to be important because it is related to the law of whether a transaction is haram or halal and several contracts can be combined so that you can find the appropriate contract to use in transactions. There are six possible contracts implemented in sharia financial institutions, namely kafalah, hawalah, wakalah, qardh, ijarah, and murabahah.

Keywords: *Sharia credit cards, contracts, Sharia financial institutions*

Pendahuluan

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia pada masa sekarang mulai banyak di minati oleh masyarakat. Hal ini dapat ditinjau dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah ataupun lembaga non perbankan syariah yang melakukan pembiayaan syariah. Bank syariah memiliki suatu produk dalam melakukan pembiayaan dengan dikeluarkannya kartu kredit untuk alat membayar sesuatu yang tujuannya memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi di *merchant* (pedagang) dengan menerima persediaan pembayaran dengan memakai kartu kredit syariah.

Pengertian dari kartu kredit merupakan sebuah alat bertransaksi yang menggunakan kartu dalam melaksanakan pembayarannya terhadap keharusan muncul dalam aktivitas perekonomian seperti transaksi pembelian atau menarik uang yang mana kewajiban nasabah ditanggung oleh *acquirer* (penerbit) terlebih dahulu, lalu pemilik kartu akan melaksanakan kewajiban kepada *acquirer* dalam kesepakatan waktu yang telah sepakat antara kedua pihak secara langsung maupun secara angsuran (Sjahdeini, 2015, p. 448).

Dalam perbankan syariah pengertian kartu kredit diatur pada Fatwa DSN-MUI No.42/DSN-MUI/V/2004 berkenaan *syariah Charge Card* serta No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syariah card* merupakan kartu dengan kegunaan serupa seperti kartu kredit biasanya yang didasari pada sistem yang telah tersedia yang terdapat beberapa pihak yang bersangkutan dan dilandaskan pada ketentuan agama Islam (Firmanda, 2014, p. 256).

Akad yang dipakai pada kartu kredit sangat beragam. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang terkait sehingga penetapan akad kartu kredit masih diperdebatkan dikalangan ulama. Penetapan akad dianggap sesuatu yang penting karena dapat menentukan hukum haram-halalnya suatu transaksi. Maka dari itu, pembahasan penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana implemtasi hukum kartu kredit dalam keuangan syariah yang pada nantinya akan dilihat berdasarkan akad dan persyaratan dalam menggunakan transaksi kartu kredit

Metodologi

Metode penelitian ini memakai kualitatif deskriptif dimana metode penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian dengan mendefinisikan sesuatu, kejadian maupun peristiwa yang terjadi pada saat sekarang dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review*. Perolahan data yang dilakukan didasari pada referensi literatur ilmiah, buku dan penelitian terdahulu (Rosyidah & Ridlwan, 2022). Setelah data dikumpulkan proses selanjutnya adalah menganalisis dari data tersebut kemudian di dekripsikan dan diambil kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kartu Kredit dalam Keuangan

Dalam terminologi kartu kredit dikalangan para ekonom dan praktisi perbankan biasa menggunakan nama *bithaqah al-i'timaniyah*. Peristilahan tersebut selalu digunakan pada dunia ilmiah atau dalam bank. Kata *isti'man* dalam istilah fiqih adalah “membeli sesuatu dari seseorang tanpa bertanya kepadanya bagaimana ia menjualnya.” Hal ini karena diartikan sebagai jualbeli amanah karena, asal kata dari *i'timan* adalah amanah berasal dari bentuk kata *isti'man*. Oleh para ulama diperluas lagi maknanya dalam pembahasan aktivitas keuangan yaitu “menjadikan milik orang lain ke dalam hartanya dengan cara Amanah” (Wahab & Sulaiman, 2006, p. 1).

PBI No.11/11/PBI/2009 mengungkapkan kartu kredit ialah APMK yang bisa dipakai untuk membayar terhadap kewajiban yang muncul dalam aktivitas perekonomian seperti transaksi dalam berbelanja maupun melakukan tarik uang yang mana kewajiban pemilik kartu di tanggung oleh *acquirer* (penerbit) terlebih dahulu, lalu pemilik kartu akan melaksanakan kewajiban membayar kepada *acquirer* tergantung kesepakatan waktu yang dilakukan secara langsung maupun angsuran.

Dalam perbankan syariah pengertian kartu kredit diatur pada Fatwa DSN-MUI No.42/DSN-MUI/V/2004 mengenai *syariah Charge Card* serta No.54/DSN-MUI/X/2006

berkenaan *syariah card* merupakan kartu dengan kegunaan serupa dengan kartu kredit pada umumnya didasari system yang telah tersedia yang terdapat beberapa pihak yang bersangkutan dan berlandaskan pada ketentuan agama Islam. Sehingga pengertian dari kartu kredit secara umum adalah kemampuan seseorang dalam membayar sejumlah kewajibannya kepada pihak bank atau lembaga keuangan tempat ia bertransaksi yang timbul dari kegiatan ekonomi, berdasarkan kepercayaan akan kemampuan dalam melakukan pembayaran pada masa mendatang baik secara langsung maupun secara berangsur.

1. Pihak-pihak terkait

Transaksi kartu kredit biasanya melibatkan beberapa pihak, antara lain yaitu (Wardani, 2016, p. 36):

- a. *Issuer* atau dinamakan dengan muqarib (kreditur) merupakan pihak yang diberi kekuasaan agar melakukan penerbitan kartu terhadap nasabah yang selaras pada dengan UU dan bertindak sebagai wakil pada *card holder* (pengguna kartu) untuk melakukan pembayaran atas nominal pembayaran dilakukan terhadap merchant.
- b. *Card Holder* atau pengguna kartu kredit atau dapat disebut juga muqtaridh (borrower) adalah seorang yang berwenang menggunakan kartu dan wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul karena penggunaan kartu terhadap issuer perbankan..
- c. *Merchant* atau penyedia barang atau jasa (pemasok) ialah pihak tertentu yang memiliki keterikatan pada issuer perbankan dalam menyediakan jasa maupun barang terhadap card holder dengan kesepakatan yang telah sesuai dan dibuat.
- d. *Acquirer* atau pengelola merupakan salah satu pihak perwakilan dalam kepentingan yang dimiliki oleh penerbit dalam penyaluran kartu kredit untuk melaksanakan tagihan terhadap pemilik kartu kredit serta melaksanakan kewajiban membayar terhadap merchant/penjual

2. Jenis-jenis akad dalam transaksi kartu kredit

Dalam akad pemakaian transaksi kartu kredit semakin berkembang untuk memunculkan beberapa permasalahan mengenai akad yang dipakai untuk melakukan transaksi dengan kartu kredit ditinjau dari pandangan *fiqh* Islam. Pihak yang telah berpartisipasi terhadap transaksi mengguakan kartu kredit telah terlalu banyak sehingga para fuqaha' kesusahan untuk mengukuhkan jenis maupun macam-macam akad yang tepat untuk dipakai. Ulama' sebagian memiliki pandangan bahwasanya transaksi memakai kredit memakai hanya satu akad, namun beberapa ulama yang lain mengungkapkan bahwa terdapat 6 akad, antara lain *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *ijarah*, *qardh*, serta *murabahah*.

Sedangkan dari DSN-MUI mengatakan bahwasanya hukum dari pemakaian kartu kredit memiliki tiga akad yang digunakan yaitu kartu kredit sebagai jasa kafalah (jaminan) dengan bersamaan pada tanggungan pembayaran (*qardh*) dan imbalan jasa (*ijarah*) agar dapat memberikan kemudahan dalam bertansaksi. Perusahaan atau perbankan bertindak menjadi issuer dengan pengeluaran kartu kredit (atribut kafalah) sebagaimana penjamin (*kaafil*) teruntuk *card holders* terhadap beraneka ragam pentransaksian (Dewan Syariah Nasional, 2016).

Para ulama membolehkan menggunakan akad kafalah pada akad muamalat dan didasari pada ayat al-Qur'an (QS. Yusuf : 72) (Departemen Keagamaan, 2006).

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat

mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Dari sepotong ayat diatas terdapat lafad “رَعِيْمْ” (Za'im) diakhir ayat diungkapkan Ibnu Abbas yaitu “*kaafil*” sebagai hadist “Az-Za'im Gharim” yang berarti: seorang yang menjamai seperti berhutang. (HR. Abu Dawud, Ibnu Hibban, Turmudzi) (Ibrahim, 2010, p. 92).

Kafalah merupakan akad *tabarru'* (antaradin) dan memiliki nilai ubudiyah dan tergolong partisipasi untuk kebaikan (*ta'awun 'ala al-birry*), penjamin memiliki hak melakukan permintaanterhdap yang berhutang, tanpa berharap upah atas jasa itu. Apabila terutang memberi sebagai hadiah atau hibah sebagai bentuk ucapan terimakasih, maka itu boleh. Akan tetapi, jika penjamin menuntut jasa imbalan atau sejenis dana angsuran adminstrasi kartu kredit maupun lain-lain dengan tidak secara kerelaan maka diperbolehkan khusus pemakai jasa jaminan yang terpenihi tuntutananya atau imbalan apabila tuntutan tersebut dibutuhkan untuk keperluan yang sepatasnya seperti untuk transaksi berbisnis, aktivitas sosial maupun lain-lain. Akan tetapi ketetapan keuangan jasa tersebut tidak diperboleha terlalu tinggi karena akan membebankan pihak mempunyai hutang, hal itu dikarenakan agar terjaganya asal dari tujuan berkafalah, yaitu jasa menolong seperti jaminan hutang terhadap merchant yang memberikan penerimaan kartu kredit yang tela disepakati (Mustofa, 2015, p. 20).

Menurut, Rafiq Yunus al-Misry tidak menyetujui apabila yang bersangkutan menerbitkan kartu yang dianggap seperti penjamin (*kafil*) terhadap pemilik kartu. Hal itu dikarenakan sebagai akad *kafalah bi ujr* (jaminan terhadap pembayaran), menurut misry akad dalam kartu kredit adalah jenis akad *hawalah* (peralihan hutang) (Wardani, 2016, p. 39). Sedangkan kartu kerdit yang menggunakan model pembiayaan murabahah adalah kerjasama antara pihak bank dengan pedagang. Yang dimana, pihak bank dapat membeli barang dari pedagang (merchant) dan kemudian menjual barang tersebut secara cicilan kepada nasabahnya.

Dari perbedaan pendapat mengenai penggunaan akad kartu kredit di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi kartu kredit ialah hal baru dalam bermuamalah. Oleh karena itu sangat sulit didalam memberikan suatu jenis akad dengan tepat serta dipakai terhadap kartu kerdit. Namun terdapat tiga akad kartu kredit yang dipakai dalam kelembagaan pendanaan syariah adalah selaras didalam fatwa DSN-MUI yaitu akad qardh, ijarah dan juga kafalah.

Hukum Kartu Kredit Dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Hukum yang tidak membolehkan

Hukum kartu kredit secara konvensional adalah haram hal ini berdasarkan dari keharamnya yang merujuk dalil tentang riba dalam surat (Qs. Al-Baqarah : 278)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Qs. Al-Baqarah : 278).

Dalam perbankan konvensional transaksi kartu kredit ialah sebuah bentuk dari hutang nasabah kepada bagian bank dan di dalamnya terdapat dendayang menimbulkan

bunga. Adanya denda dikarenakan keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran kepada pihak bank yang jumlah dendanya sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak di awal perjanjian. Dari hal tersebut, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa para ulama telah sependapat bahwa pemberi utang yang mengharuskan terdapat penambahan terhadap hutang yang dibayar adalah haram”, selain itu Ibnu Qodamah juga mengatakan, “hutang yang di dalamnya mengharuskan terdapat tambahan pada persyaratannya tersebut haram serta tiada satupun perdebatan didalamnya (Wahyuningsih, 2013, p. 6). Dengan demikian transaksi kartu kredit dalam konvensional adalah haram karena terdapat riba di dalam denda akibat terlambat pelunasan pada tenggat masa yang ditentukan bagian perbankan. Hal ini tergolong tambahan harta atas hutang dan dianggap riba

2. Hukum yang membolehkan

a. Dilihat dari segi akad

Dalam perbankan syariah penggunaan akad dalam kartu kredit sangat jelas sehingga transaksinya dapat terhindar dari riba adapun bentuk akadnya yaitu: Dalam penggunaan akad ijarah atau sewa, nasabah dikenakan biaya sewa atas penggunaan layanan kartu pembiayaan syariah (*wakalah bil ujarah*). Perbankan syariah bertindak sebagai wakil pembayaran serta menerima komisi untuk mewakilinya. Memberi komisi bisa dibebankan pada keikutsertaan pemberian kartu terhadap nasabah.

Akad piutang maupun pinjaman, qardhul hasan adalah peminjaman baik. Disebut peminjaman baik dikarenakan peminjamannya tidak membebankan imbalan lain maupun bunga. Perbankan syariah saat menyediakan fasilitasnya pada pembiayaan kartu yang bersangkutan sebagaimana pemberi jaminan. Akad kafalah. Dimana pihak perbankan sebagai penerbitan kartu pembiayaan yang menjamin (*kafil*) terhadap ketersediaan kafalnya, perbankan syariah bisa menyalurkan komisi atas jasa tanggungan yang diberikan. Dalam lembaga keuangan syariah ketika ingin menerbitkan kartu kredit, terdapat syarat-syarat antara lain:

- 1) Iuran tahunan dibebankan oleh penerbit kartu untuk menutup biaya pengeluaran yang berkaitan pada penerbit serta pemakaian kartu.
- 2) Bebas bunga terhadap batas fasilitas kreditnya (interest-free revolving credit lin)
- 3) Kartu kredit memberi kebebasan terhadap pemiliknya agar dapat melakukan berbagai transaksi dari (merchant) dengan penerimaan pembayaran dari pelanggan dalam pemakaian kartu kredit sesuai dengan batasan tertentu.
- 4) Batasan pengambilan uang diperuntukkan dalam situasi darurat
- 5) Persentase komisi diperuntukkan kepada penjual yang menerima kartu dalam transaksinya
- 6) Pemilik kartu melakukan pembayaran hutang wajib tiap bulan dan saldo tersisa yang terlambat pada bulan yang akan datang tanpa bunga
- 7) Denda dikenakan agar melindungi pemegang kartu dari kelalaian dan denda akan ditujukan teruntuk kepentingan amal jarinyah dari pemilik kartu diharuskan memakai kartu dengan tujuan yang tidak diharamkan dalam Islam.

Selain itu fatwa DSN MUI berkaitan dibolehkannya menggunakan kartu kredit dengan dasar DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*. Yang di dalamnya dijelaskan mengenai kartu syariah merupakan alat yang berguna untuk kartu kredit dengan berlandaskan pada prinsip agama Islam yang telah diatur oleh fatwa. Terdapat batasan

tidak boleh dilakukan seperti : a) tidak adanya unsur riba, b) transaksi bukan melanggar ketentuan Islam, c) pengeluaran yang tidak berlebih-lebihan dalam pengeluaran (*israf*), d) pemilik kredit mempunyai harta yang berkecukupan agar dapat membayar pembelanjaan, e) tidak memberikan fasilitas yang bertolak belakang pada syarat.

DSN – MUI melakukan pertimbangan terhadap ketentuannya dengan mempermudah transaksinya, memberikan keamanan, serta memberikan kenyamanan terhadap nasabah untuk bertransaksi serta menarik uang. Oleh karena itu, perbankan Syariah harus terus berupaya untuk terus mengevaluasi diri dengan melakukan persediaan yang seupa dengan kartu kredit seperti alat untuk membayar memakai kartu agar bisa melaksanakan kewajiban membayar yang terjadi dalam siklus perekonomian seperti membayar suatu transaksi maupun menarik uang, yang mana pemilik kartu harus terpenuhi lebih dahulu oleh penerbit atau acquirer, serta pemilik kartu tersebut wajib melunasi pembayaran wajib secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan.

DSN – MUI memiliki pedoman dalam fatwa yang dikeluarkan pada Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu: “uamtu muslim diperbolehkan melakukan segala sesuatu perjanjian kecuali dengan hal yang haram dihalalkan, maupun hal yang halal diharamkan dengan ketentuan yang mengikat kecuali hal yang telah tidak dibolehkan di atas” (HR. Tirmidzi). Kemudian, “hal yang memberikan bahaya (memberikan kerugian) pada orang lain maupun diri sendiri tidak diperbolehkan dilakukan” (HR. Ibnu Majah dan al-Daraquthni) (Asmawati, 2015, p. 54).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits mengenai *Qord*: “Rasulullah SAW dihadapkan pada jenazah pria yang akan disholati. Rasulullah bertanya, ‘Apakah dia mempunyai hutang?’ Shahabat menjawabnya, ‘Tidak’. Setelah itu beliau mensholati jenazah tersebut. Dan jenazah selanjutnya Rasulullah juga bertanya hal yang sama, ‘Apakah dia memiliki hutang?’ Shahabat menjawab, ‘Iya’. Rasulullah berucap, ‘Sholati kawanmu tersebut’ (beliau enggan untuk mensholatinya). Setelah itu Abu Qatadah berjanji, ‘Ya Rasulullah, saya yang akan menjahin hutangnya’. Lalu Rasulullah mensholati jenazah tersebut.” hal tersebut diperjelaskan oleh hadits yang dikemukakan oleh Tirmidzi, Abu Daud, serta Ibn Hibban: “*Za’im* (seseorang penjamin) merupakan *gharim* (seorang penanggung hutang).

Dalam hadits lain yang dikemukakan oleh Muslim mengatakan: “seseorang yang membantu orang lain dalam kesukaran di hidupnya, maka di hari kiamat Allah SWT akan membantu kesulitannya hari kiamat kelak serta Allah SWT akan melakukan pertolongan pada hambanya terhadap seseorang yang senang menolong saudaranya”. Dalam hadits lain yang dikemukakan Jama’ah: “melakukan penundaan (pembayaran) seorang yang mampu membayar maka termasuk dalam kedholiman”, serta hadits yang dikemukakan Abu Daud, Nasa’i, Ibn Majah, serta Ahmad: “Melakukan penundaan (membayar) yang diperbuat oleh seseorang yang memiliki kemampuan membayar, mengahalkan harga dirinya serta memberi sanksi terhadapnya. Dan juga hadits yang dikemukakan oleh Bukhari: “seseorang yang paling baik diantara kalian ialah seseorang yang membayar hutang dengan paling baik.

Selain landasan al-Qur’an serta Hadits, DSN-MUI memakai qoidah fihiyyah dalam mendasari fatwa yang telah dikemukakan, antara lain:

1) Pada dasarnya, segala suatu transaksi muamalat diperbolehkan dikecualikan terdapat

dalil tentang keharamannya.

- 2) Kesulitan bisa menarik kemudahan.
- 3) Kebutuhan (hajat) bisa menjadi darurat.
- 4) Adat kebiasaan dapat berlaku seperti syara' selamat tidak bertentangan pada ketentuan Islam.
- 5) Menghindar dari kerusakan (kerugian) diharuskan untuk didahului (diprioritaskan) dari pada mendatangkan masalah.

Menurut profesor IIUM Malaysia yaitu Daud Bakar, mengungkapkan bahwasanya istilah kartu kredit tidak diketahui oleh Syariat, sehingga istilah yang sesuai yaitu kartu debit. Ungkapan tersebut menjelaskan kesangsian dalam kesyariaan dari kartu kredit yang disebabkan pada analogi bahwasanya kartu kredit memiliki fungsi untuk mengisratkan seseorang agar berhutang. Dalam Syariat, melakukan hutang ialah hal yang dianjurkan untuk dilakukan. Ungkapan yang dikemukakan tersebut dilandasi pada hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari : “seorang yang telah memiliki hutang akan selalu berbohong dan tidak dapat menepati janji yang telah diungkapkan. Maka, Rasulullah SAW sering berdoa supaya beliau tidak pernah berhutang.” Meskipun begitu, Syariat Islam memberikan anjuran terhadap seorang yang memiliki kesulitan dalam menuerahkan hutang dengan memberikan keringanan pembayarannya pada firman Allah SWT.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua) utang itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(al- Baqarah :280).

Kartu pembiayaan syariah mempunyai hal yang istimewa jika dihadapkan pada kartu kredit konvensional, yaitu pemakaiannya dalam sektor yang produktif, tidak termasuk konsumtif. Adapun nasabah yang memakai kartu pembiayaan syariah bisa menunaikan zakat, infaq maupun sedekah dengan otomatis (*autodebet*

3. Dilihat dari Denda Keterlambatan

Dalam bank konvensional denda keterlambatan termasuk dalam ribakarena terdapat bunga. Denda yang ygn diberikan termasuk dalam riba menurut kesepakatan para fuqaha' dan tidak ada perdebatan atas pendapat tersebut. Namun, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No.54/DSN-MUI/X/2006, *issuer* bisa memberikan *ta'widh*, berupa sebagai kerugian pada pembayaran yang telah digunakan *issuer* disebabkan oleh waktu tenggat waktu yang terlambat. Selain hal tersebut, *issuer* juga bisa memberikan denda dari pembayaran yang terlambat (*late charge*) dah hal tersebut harus dianggap sebagaimana dana sosial (Ibrahim, 2010, p. 99).

Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil pada uraian diatas bahwasanya hukum kartu kredit dilihat dari berbagai macam akadnya yaitu terdapat kebolehan serta terdapat yang tidak memperbolehkannya, ulama yang tidak membolehkan karena dianggap mengandung riba dan ulama yang membolehkan karena dalam transaksi kartu kredit termasuk dalam akad kafalah,

ijarah, dan qardh. Dimana hukum pada akad tersebut sesuai pada dalil maupun hadist yang ada yang pemakaiannya disesuaikan pada akad yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Asmawati. (2015). Analisis Yuridis Penyalgunaan Kartu Kredit terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Departemen Keagamaan. (2006). *Al-Qur'an dan terjemahan juz 1-30 Edisi Baru*. CV Pustaka Agung Harapan.
- Dewan Syariah Nasional. (2016). *Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (2006), Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Crad*.
- Firmanda, H. (2014). Hengki Firmanda, kredit syariah) ditinjau dari asas utilitas dan masalah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 04(02).
- Ibrahim, A. (2010). Kartu dalam Hukum Syariah: Kajian terhadap akad dan persyaratan,. *Jurnal Al-Mu'asbiruh*, 7(1).
- Mustofa, U. A. (2015). Syariah Card Perspektif al-Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(01).
- Rosyidah, I., & Ridlwan, M. (2022). Konsep Pendidikan Humanistik Perspektif Ki Hajar Dewantara Dan Paulo Freire Dalam Kritik Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 79–88. <https://doi.org/10.36835/hjsk.v12i01.3917>
- Sjahdeini, S. R. (2015). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek hukumnya*. Renadamedia Group.
- Wahab, A., & Sulaiman, I. A. (2006). *Banking Cards Syariah (Kartu Kredit dan Debit dalam prespektif fiqih)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Wahyuningsih, N. (2013). Kartu Kerdit (suatu tinjauan syariat Islam), , 2013. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Wardani, F. A. (2016). Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam. *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).